

**PENGELOLAAN KEUANGAN GAMPONG
DI GAMPONG BLANG MAKMUR KECAMATAN KUALA
BATEE KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

TESIS

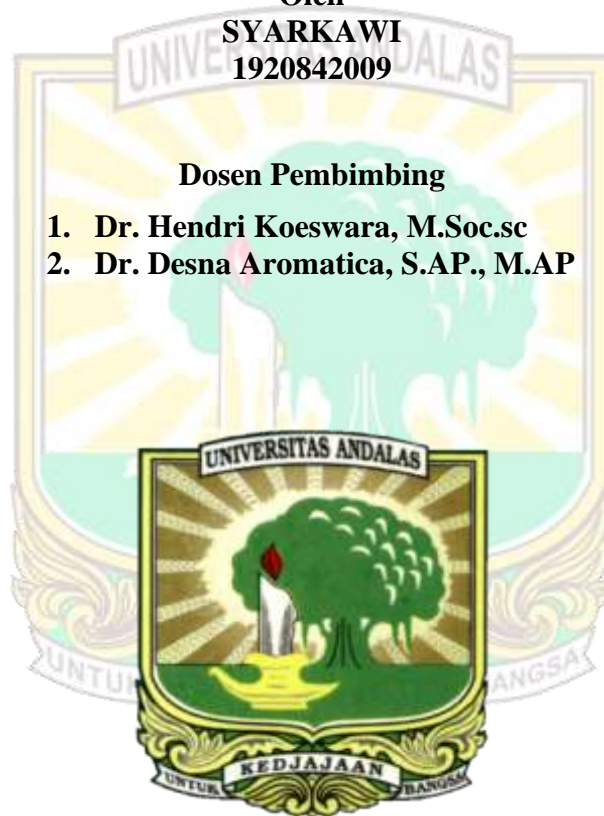
Oleh

SYARKAWI

1920842009

Dosen Pembimbing

- 1. Dr. Hendri Koeswara, M.Soc.sc**
- 2. Dr. Desna Aromatica, S.AP., M.AP**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2023**

ABSTRAK

Syarkawi, Nomor BP 1920842009, Pengelolaan Keuangan Gampong di Gampong Blang Makmur Kecamatan Kuala Bate Kabupaten Aceh Barat Daya, Jurusan Magister Administrasi Public, Fakultas Ilmu Social Dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang, 2023, Dibimbing oleh: Dr. Hendri Koeswara, M.Soc. sc dan Dr. Desna Aromatica, S.AP., M.AP. Tesis ini terdiri 175 halaman dengan referensi 31 buku, 21 jurnal, 7 peraturan, dan 6 website.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjadi tonggak perubahan paradigma tentang desa. Desa bukan lagi objek tetapi telah menjadi subjek pembangunan dan memiliki kewenangan untuk mengelola keuangannya sendiri. Sebagai konsekuensi adanya kewenangan tersebut pembiayaan ataupun keuangan merupakan faktor yang sangat esensial dalam mendukung penyelenggaraan otonomi desa atau gampong. Penyerahan kewenangan kepada gampong menimbulkan tuntutan besar terhadap pengelolaan keuangan oleh masyarakat terhadap Pemerintah Gampong. Tuntutan tersebut harus direspon dengan melakukan perubahan-perubahan dalam pengelolaan keuangan gampong. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan di Gampong Blang Makmur Kecamatan Kuala Batee berdasarkan teori Muiz Raharjo (2021) dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dengan metode penelitian dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa di Gampong Blang Makmur telah sesuai dengan tahapan berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Namun, terdapat beberapa kekurangan dan kelemahan dalam pelaksanaan pada setiap tahapannya, antara lain; Penetapan APBG tidak tepat waktu, Pendapatan Gampong yang hanya mengandalkan dana transfer, pemahaman Bendahara Gampong di bidang penatausahaan masih kurang, dan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Gampong mengalami terlambat.

Kata kunci: Pengelolaan, Keuangan, Desa

ABSTRAK

Syarkawi, BP Number 1920842009, Gampong Financial Management in Gampong Blang Makmur, Kuala Bate District, Southwest Aceh Regency, Department of Master of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Andalas University, Padang, 2023, Supervised by: Dr. Hendri Koeswara, M.Soc. sc and Dr. Desna Aromatica, S.AP., M.AP. The thesis consists of 175 pages with references to 31 books, 21 journals, 7 regulations, and 6 websites.

The birth of Law Number 6th of 2014 concerning Villages became a milestone in changing the paradigm about villages. The village is no longer an object but has become a subject of development and has the authority to manage its own finances. As a consequence of this authority, financing or finance is a very essential factor in supporting the implementation of village autonomy or gampong. The handover of authority to gampong raises great demands on financial management by the community against the Gampong Government. These demands must be responded to by making changes in gampong financial management. This study aims to determine how financial management in Gampong Blang Makmur, Kuala Batee District, based on the theory of Muiz Raharjo (2021) and Permendagri Number 20th of 2018 concerning Village Financial Management. The research method is carried out using descriptive qualitative research types with data collection techniques in the form of interviews, documentation and observation. The results showed that village financial management in Gampong Blang Makmur was in accordance with the stages based on Permendagri Number 20th of 2018 concerning Village Financial Management. However, there are several shortcomings and weaknesses in implementation at each stage, including; The determination of APBG was not timely, Gampong's revenue only relied on transfer funds, the Gampong Treasurer's understanding in the field of administration was still lacking, and the Gampong Government Accountability Report was delayed.

Keywords: Management, Finance, Village

